

Habibi

by UNITRI Press

Submission date: 10-Mar-2023 09:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2002963015

File name: Habibi.docx (44.7K)

Word count: 1138

Character count: 7628

**PERAN KEPEMIMPIN LURAH¹ DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA
PEGAWAI**
(Studi Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang)

SKRIPSI



Oleh :
HABIBI
NIM : 2016210066

RINGKASAN

Sedikitnya 8 ASN telah melanggar hukum secara besar-besaran, dan masih banyak ketidakdisiplinan di Aparatur Sipil Negara. Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur melakukan beberapa pekerjaan di tingkat daerah. Mereka memiliki dua pasangan dan dua suami, dan dua di antaranya diberhentikan ketika ditemukan dengan narkoba. Selain itu, ada 13 pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam penelitian kualitatif ini, data dianalisis dengan berbagai metode, antara lain mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan orang, kemudian mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini tentang kepemimpinan: yang pertama adalah memberi contoh yang baik dengan datang dan pergi tepat waktu; yang kedua adalah membimbing dengan memberikan instruksi yang jelas dan mendesak para pekerja untuk menjalin ikatan persahabatan dan kerja sama; dan yang ketiga memperkuat dengan memfasilitasi percakapan di mana para pekerja mendiskusikan pengalaman kerja mereka sendiri dan menawarkan nasihat berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Bantuan tambahan terutama tersedia melalui pertemuan staf lurah yang sering atau ketat. Elemen yang mengencangkan hati, baik internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Disiplin, Kerja, Pegawai.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Etos kerja menunjukkan keberhasilan perusahaan. Ketaatan, kesetiaan, pengabdian pada tugas, rasa tugas yang kuat, dan komitmen terhadap tugas yang diberikan membantu pekerja mencapai tujuan perusahaan. Pemerintahan yang efektif bergantung pada mesin pemerintah yang melayani negara dan masyarakat. "Disiplin Pegawai Negeri adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak dipatuhi atau dilanggar dikenakan sanksi disiplin," menurut Peraturan Pemerintah No. Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010. Meski ada upaya kontrol dari pemerintah, pegawai siap menanggung hukuman karena melanggar tugas dan wewenangnya. Buruh birokrasi harus waspada dalam pengabdian masyarakatnya, namun hingga saat ini, ketidakpatuhan terhadap aturan menyebabkan rendahnya hasil kerja.

PNS Oro-oro Dowo Malang bunuh diri di Kantor Kelurahan. Krismon Sudarmojo, Lurah Oro-oro Dowo mengatakan, korban merupakan pegawai yang rajin. Pada kenyataannya, dia dan korban terkait. Menurut dia, korban yang menjabat sebagai bendahara itu terpantau bekerja lembur di kantor beberapa hari ini. Meski masih hari libur, saya tidak bisa menyuruh karyawan bekerja lembur," ujarnya. Krismon mengaku melihat korban sering merenung akhir-akhir ini. berkali-kali Ini akan berlanjut dari kantor kejaksaan setelah liburan. Dari situ, saya sering membayangkan, bahwa tugas itu belum selesai. Dia menjelaskan. Diduga kuat korban saat ini sedang mengurus masalah sertifikat tanah di Jl. BS Riadi Kelurahan Oro-Oro Dowo. Saat diverifikasi, Kejaksaan Negeri Kota Malang tidak memberikan rincian spesifik terkait kasus yang sedang disidik. Hukuman gantung itu dibenarkan Kapolsek Klojen Compol Budi Harianto. Kami melanjutkan penyelidikan kami. Mungkin karena dia terlalu malas menghadapi masalah, dia percaya bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan mengakhiri hidup.

“Menurut informasi yang kami terima, korban saat ini sedang mengalami kesulitan sertifikat tanah,” kata Kompol Budi Harianto. Selasa (19/6/2018).

Sedikitnya delapan ASN di Kabupaten Malang, Jawa Timur, melakukan kesalahan yang signifikan karena ketidakpatuhan pegawai negeri sipil (sekarang disebut PNS) dari kelompok kerja daerah yang berbeda. Mereka kehilangan pekerjaan dan dipecat setelah polisi menemukan narkoba dan dua rekan di kendaraan mereka. Gubernur Malang Rendra Kresna mengatakan masih ada ruang untuk pertumbuhan disiplin ASN berdasarkan evaluasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Karena banyak pegawai pemerintah terus melanggar hukum. Mengapa? “Karena kata pakewuh biasanya menyebabkan pimpinan tidak cepat-cepat meluruskan pegawainya yang melakukan kesalahan,” jelas Rendra. Rendra melakukan tawar-menawar dengan atasannya kemarin (24/7), menyusul peluncuran Pedoman Teknologi Penyuluhan dan Penanganan Kasus Pelanggaran PNS di Savana Hotel and Convention, dengan harapan bisa menindak tegas pegawainya yang melakukan pelanggaran. Mengatakan, "Misalnya, tiga hari berturut-turut tidak diajukan tanpa alasan, harus segera dihukum, tidak bisa dianggap enteng," Rendra memberikan ilustrasi. Sanksi diberikan agar pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang melibatkan hukuman PNS tidak terulang kembali. Dua dari mereka harus dipecat dari pekerjaannya di pemerintahan, kata Nurman, karena beratnya pelanggaran yang mereka lakukan. Menurut Nurman, seorang anggota ASN Eselon IV di Pemkab Malang menikah di luar persetujuan pimpinan dan seorang anggota rombongan lainnya ditahan karena kepemilikan narkoba. Tingkat keparahan pelanggaran berkisar dari ringan (tiga) hingga sedang (satu). Kedudukan ASN, menurut Nurman, adalah yang utama tanpa memandang pangkat. Menurut Nurman, hanya pernyataan ketidakpuasan dari pengawas yang mungkin diperlukan untuk pelanggaran kecil seperti melewatkan rapat, tenggat waktu, atau kegiatan lain yang diamanatkan

pemerintah. Pada pukul 10:22 tanggal 25 Juli 2018, radarmalang.jawapos.com memposting laporan ini.

Malang, Pemkab Jatim melepas 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melanggar kebijakan etik. Sebelas dari mereka diberhentikan tanpa peringatan karena absen yang berlebihan. Dua pegawai pemerintah diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat dalam kasus pidana, sementara sebelas lainnya diberhentikan dengan hormat. Meski totalnya hanya sebelas orang, beberapa di antaranya berhak pensiun. Saat menentukan apakah akan memberikan anuitas atau tidak, tingkat kesalahan pemohon dan masa kerja dipertimbangkan. Karena masa kerja biasanya lebih dari dua puluh tahun, enam dari sebelas pegawai pemerintah yang diberhentikan dengan hormat memenuhi syarat untuk mendapatkan anuitas. Pada Senin, 2 April 2013, Kelvin, Direktur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang, menjelaskan bahwa setiap kecamatan di Malang memiliki pemerintahan sendiri yang disebut Kelurahan, yang dipimpin oleh seorang Lurah dan didukung oleh seorang juru tulis dan lainnya. anggota staf sesuai kebutuhan. Tugas dan tanggung jawab utama Kelurahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005: mengatur urusan pemerintahan dan sosial; melaksanakan arahan pemerintah dari Walikota. Atasan yang tegas dan mau mengambil risiko diperlukan agar tugas dan tanggung jawab tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan sukses. Semua anggota personel kinerja perusahaan harus dikenakan tindakan disipliner. Penggunaan kontrak yang mengikat secara hukum dan tindakan disipliner dapat mencegah karyawan melakukan kesalahan.

Dari serangkaian masalah diatas ¹penulis tertarik buat mengkaji lebih jauh dengan cara mengangkatnya pada suatu kajian atau penelitian ilmiah memakai judul “Peranan Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai”

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang konflik pada atas maka rumusan dilema dalam penelitian ini merupakan menjadi berikut:

1. Bagaimana peran pemimpin Lurah untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai pada Kelurahan Oro-Oro Dowo?
2. Apa faktor-faktor pendukung peran pemimpin Lurah dalam menyikapi dilema-persoalan disiplin kerja pegawai pada Kelurahan Oro-Oro Dowo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat berasal latar belakang dan rumusan dilema pada atas maka tujuan di penelitian ini ialah:

1. buat mengetahui peranan pemimpin Lurah dalam menaikkan disiplin kerja pegawai.
2. buat mengetahui faktor yang mendukung serta cara membentuk peranan pemimpin Lurah di menyikapi masalah-masalah disiplin kerja pegawai.
3. buat mengetahui disiplin kerja pegawai.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan mengamati dan mempelajari bagaimana kawasan tersebut dimanfaatkan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kepemimpinan biola⁵ meningkatkan etos kerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ilmu manajemen publik, khususnya dalam efisiensi dan toleransi sosial, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji isu-isu yang berkembang. berdampak pada kenyataan.

2. Manfaat praktis

Peneliti menyampaikan gagasan kepemimpinan Lurah. Hasil penelitian ini dapat direalisasikan sebagai masukan bagi pimpinan terkait peningkatan kinerja pegawai. Bagi penulis penelitian

ini diperlukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dampak kepemimpinan lurah terhadap kinerja pegawai.

Habibi

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	15%
2	bbppksmakassar.kemsos.go.id Internet Source	3%
3	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet Source	1%
4	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
5	etd.eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	www.beritakorupsi.co Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Habibi

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
